# PEMULIHAN LEGITIMASI PENDAKWAH POPULER PASCA-POLEMIK DIGITAL: ANALISIS KOMPARATIF GUS MIFTAH DAN KHALID BASALAMAH DALAM PERSPEKTIF MAX WEBER

**Akdila Bulanov[1], Shania Jumarnis[2], Dena Amelia[3], Hanif Maulana[4], Robila Putri Lubis[5], Arizal[6], Syadefi Mulya[7]**

[1,2,3,4,5,6,7]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : akdilabulanov@uinbukittinggi.ac.id[1], shaniajumarnis065@gmail.com[2], denaamelia013@gmail.com[3], maulanahanif334@gmail.com[4], muhammadarizalarizal564@gmail.com[6], muliasyadefi@gmail.com[7]

**ABSTRAK**

Perkembangan media digital telah mengubah dinamika otoritas keagamaan, menjadikan pendakwah populer tidak hanya sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai figur publik yang menghadapi penilaian dan kontestasi opini masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemulihan legitimasi pendakwah populer pascapolemik digital melalui perbandingan kasus Gus Miftah dan Khalid Basalamah dalam perspektif otoritas Max Weber. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif dan analisis konten terhadap video permintaan maaf serta klarifikasi kedua pendakwah, dengan menggunakan konsep otoritas karismatik, tradisional, dan rasional-legal sebagai kerangka analisis. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa Gus Miftah cenderung menampilkan strategi pengakuan kekhilafan, permohonan maaf, introspeksi, dan pemulihan hubungan interpersonal, sedangkan Khalid Basalamah lebih menekankan klarifikasi konteks, penjelasan argumentatif, pembatasan interpretasi, serta permohonan maaf. Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa respons pascapolemik dipengaruhi oleh karakter persoalan yang dihadapi dan cara pendakwah mengelola identitas serta otoritasnya di ruang publik digital. Penelitian ini menegaskan bahwa permintaan maaf dan klarifikasi merupakan praktik komunikasi yang dapat digunakan untuk menegosiasikan legitimasi keagamaan, meskipun keberhasilan pemulihannya memerlukan kajian terhadap penerimaan audiens.

**Kata Kunci :** *Legitimasi Keagamaan, Pendakwah Digital, Permintaan Maaf, Max Weber, Polemik Digital.*

**ABSTRACT**

The development of digital media has transformed the dynamics of religious authority, positioning popular preachers not only as religious message transmitters but also as public figures subject to social evaluation and opinion contestation. This study aims to analyze legitimacy-recovery strategies employed by popular preachers following digital controversies through a comparative examination of Gus Miftah and Khalid Basalamah from the perspective of Max Weber's theory of authority. This research employs a qualitative approach with a comparative case study design and content analysis of apology and clarification videos produced by both preachers. Charismatic, traditional, and rational-legal authority serve as the analytical framework. The preliminary analysis indicates that Gus Miftah tends to employ strategies involving admission of wrongdoing, apology, self-reflection, and interpersonal relationship repair, whereas Khalid Basalamah emphasizes contextual clarification, argumentative explanation, interpretive limitation, and apology. These differences suggest that post-controversy responses are shaped by the nature of the issues involved and by how preachers manage their identities and authority within the digital public sphere. This study highlights that apologies and clarifications constitute communicative practices through which religious legitimacy may be renegotiated, although the effectiveness of such recovery requires further examination of audience reception.

**Keywords :** *Religious Legitimacy, Digital Preachers, Apology, Max Weber, Digital Controversy.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan mengevaluasi informasi keagamaan. Media sosial, platform video, dan ruang interaksi daring memungkinkan pesan dakwah disampaikan secara cepat kepada audiens yang luas, melampaui batas ruang dan waktu yang sebelumnya melekat pada kegiatan dakwah konvensional. Perubahan tersebut turut membentuk pola hubungan antara pendakwah dan masyarakat. Pendakwah tidak lagi hanya berinteraksi dengan jamaah melalui pengajian, ceramah, atau lembaga keagamaan, tetapi juga melalui unggahan, siaran langsung, video pendek, komentar, dan berbagai bentuk interaksi digital. Ruang digital dengan demikian menjadi arena baru bagi penyampaian ajaran sekaligus pembentukan, penguatan, dan kontestasi otoritas keagamaan.

Transformasi tersebut menjadikan otoritas keagamaan semakin dinamis. Dalam lingkungan digital, pengakuan terhadap pendakwah dapat terbentuk melalui kombinasi pengetahuan agama, reputasi, gaya komunikasi, konsistensi pesan, kedekatan dengan audiens, dan visibilitas platform. Media digital membuka peluang bagi pendakwah untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama memungkinkan publik melakukan evaluasi secara terbuka terhadap pernyataan maupun tindakan mereka. Pesan yang disampaikan dalam satu konteks dapat dipotong, dibagikan, dan ditafsirkan kembali oleh pengguna lain, sehingga pendakwah berhadapan dengan kondisi komunikasi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Otoritas yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada ruang pengajaran dan relasi langsung dengan jamaah kini turut dipengaruhi oleh dinamika percakapan publik digital.

Pendakwah populer dalam konteks tersebut memiliki posisi yang kompleks. Popularitas dapat memperluas jangkauan dakwah dan meningkatkan keterhubungan dengan audiens, tetapi juga membuat pernyataan dan tindakan pendakwah lebih mudah menjadi objek perhatian, kritik, dan perdebatan. Ketika terjadi polemik, persoalan tidak hanya berkaitan dengan substansi pernyataan yang dipersoalkan, melainkan juga dengan citra, kredibilitas, dan legitimasi tokoh di hadapan publik. Kritik yang tersebar melalui media digital dapat menimbulkan tuntutan agar pendakwah memberikan penjelasan, mengakui kekhilafan, menyampaikan permohonan maaf, atau memperlihatkan tindakan korektif. Respons terhadap polemik karena itu menjadi bagian penting dari komunikasi publik pendakwah.

Fenomena tersebut terlihat pada polemik yang melibatkan Gus Miftah pada 2024, ketika potongan video interaksinya dengan seorang penjual es teh menyebar luas dan memicu kritik publik. Pernyataan yang dipersepsikan sebagian masyarakat sebagai merendahkan penjual tersebut kemudian diikuti respons berupa permohonan maaf dan tindakan mendatangi pihak yang terdampak. Kasus ini memperlihatkan bagaimana interaksi yang berlangsung dalam sebuah acara dapat berubah menjadi kontroversi ketika disirkulasikan dalam ruang digital. Respons pendakwah kemudian menjadi perhatian bukan hanya karena isi permintaan maaf, tetapi juga karena cara ia mengelola kritik dan memperlihatkan tanggung jawab atas tindakan komunikatifnya.

Polemik lain melibatkan Khalid Basalamah pada 2022 terkait pernyataan mengenai wayang. Kontroversi tersebut berkembang karena pernyataan dalam ceramah dipahami oleh sebagian audiens sebagai pandangan yang mengharamkan wayang, sehingga memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara interpretasi agama dan tradisi budaya Indonesia. Khalid Basalamah kemudian menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf dengan menjelaskan konteks pernyataan serta maksud yang ingin disampaikan. Kasus ini menunjukkan bahwa polemik

pendakwah dapat berhubungan dengan interpretasi terhadap pesan keagamaan dan nilai budaya yang telah memiliki kedudukan dalam masyarakat. Respons pascapolemik menjadi ruang bagi pendakwah untuk menjelaskan kembali konteks, batas makna, dan maksud komunikasinya.

Untuk memahami dinamika tersebut, teori otoritas Max Weber menjadi kerangka analitis yang relevan. Weber membedakan otoritas karismatik, tradisional, dan rasional-legal. Otoritas karismatik bertumpu pada kepercayaan terhadap kualitas personal atau keistimewaan seorang pemimpin, otoritas tradisional memperoleh legitimasi dari kebiasaan, nilai, dan tatanan yang diwariskan; sedangkan otoritas rasional-legal bertumpu pada aturan, prosedur, serta kedudukan formal. Ketiga bentuk otoritas tersebut dapat membantu membaca bagaimana pendakwah menampilkan dasar legitimasi ketika menghadapi kritik. Dalam konteks digital, dimensi-dimensi otoritas tersebut dapat muncul melalui pengakuan personal, penegasan identitas keagamaan, argumentasi, penjelasan tanggung jawab, dan relasi dengan tradisi sosial.

Selain teori otoritas, kajian komunikasi pemulihan citra atau image repair memberikan perspektif untuk memahami strategi yang digunakan seseorang ketika reputasinya menghadapi krisis. Benoit (1997) menjelaskan bahwa komunikasi pemulihan citra melibatkan strategi yang digunakan pihak yang dikritik untuk merespons tindakan yang dianggap merusak reputasi. Kajian permintaan maaf di media sosial juga menunjukkan bahwa pesan permintaan maaf perlu dipahami dalam hubungan dengan reputasi tokoh dan penerimaan audiens, bukan semata-mata dari keberadaan kata maaf atau ekspresi emosional. Choi dan Mitchell (2022), misalnya, mengkaji video permintaan maaf YouTuber melalui strategi pemulihan citra, ketulusan, dan pengampunan. Sandlin dan Gracyalny (2018) juga menempatkan permintaan maaf YouTube sebagai praktik pemulihan citra yang terkait dengan persepsi audiens. Literatur tersebut memberi dasar untuk menganalisis permintaan maaf sebagai komunikasi strategis, tetapi penelitian ini tidak menjadikan image repair sebagai teori utama.

Penelitian tentang otoritas keagamaan di Indonesia juga memperlihatkan bahwa media digital berhubungan dengan perubahan dan negosiasi otoritas ulama. Ni'am (2023), misalnya, membahas otoritas Khalid Basalamah melalui perspektif Max Weber dan menyoroti interaksi berbagai jenis otoritas dalam konteks kesalehan dan komodifikasi agama. Kajian mengenai otoritas keagamaan digital membuka pemahaman bahwa legitimasi tokoh agama dapat terbentuk melalui berbagai sumber, termasuk pengakuan audiens, representasi identitas, praktik keagamaan, dan mediasi platform. Meskipun demikian, kajian tentang otoritas digital perlu diperluas dengan memperhatikan fase ketika pendakwah menghadapi polemik dan berusaha merespons kritik yang berpotensi memengaruhi legitimasi mereka.

Berangkat dari kajian tersebut, kesenjangan penelitian yang diangkat dalam artikel ini terletak pada fokus terhadap praktik komunikasi pascapolemik. Penelitian mengenai otoritas keagamaan digital umumnya dapat diarahkan untuk menjelaskan pembentukan, pergeseran, atau kontestasi otoritas, sedangkan artikel ini memusatkan perhatian pada bagaimana pendakwah menampilkan strategi pemulihan legitimasi melalui konten permintaan maaf dan klarifikasi. Fokus tersebut memungkinkan otoritas dipahami bukan hanya sebagai posisi yang telah dimiliki tokoh, tetapi juga sebagai sesuatu yang dinegosiasikan melalui tindakan komunikasi ketika menghadapi kritik. Perbandingan dua kasus dengan karakter polemik berbeda juga membuka ruang untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan strategi respons.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemulihan legitimasi pendakwah populer pascapolemik digital melalui perbandingan kasus Gus Miftah dan Khalid Basalamah menggunakan perspektif otoritas Max Weber. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana

dimensi karismatik, tradisional, dan rasional-legal direpresentasikan dalam konten permintaan maaf dan klarifikasi, mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan untuk merespons polemik; serta membandingkan cara kedua pendakwah mengelola identitas dan otoritas dalam ruang publik digital. Kebaruan penelitian terletak pada penekanan terhadap fase pascapolemik sebagai ruang negosiasi legitimasi, dengan memosisikan konten permintaan maaf dan klarifikasi sebagai praktik komunikasi yang dapat dianalisis secara komparatif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif untuk menganalisis strategi komunikasi pemulihan legitimasi pendakwah populer pascapolemik digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada makna, strategi, narasi, dan representasi otoritas yang ditampilkan dalam konten permintaan maaf serta klarifikasi. Desain komparatif digunakan untuk mempertemukan dua kasus, yaitu Gus Miftah dan Khalid Basalamah, sehingga kesamaan dan perbedaan strategi komunikasi dapat dianalisis berdasarkan karakter polemik masing-masing.

Data utama penelitian berupa video permintaan maaf atau klarifikasi yang dipublikasikan oleh kedua pendakwah melalui platform digital, terutama YouTube, serta transkrip atau catatan pengamatan terhadap isi video. Data audiovisual dianalisis dengan memperhatikan pernyataan verbal, susunan argumentasi, pilihan kata, penjelasan konteks, pengakuan kesalahan, permohonan maaf, komitmen perbaikan, dan tindakan yang ditampilkan. Data sekunder berupa pemberitaan media digunakan untuk membantu memverifikasi kronologi polemik dan konteks publikasi respons, bukan sebagai pengganti data video utama.

Pemilihan kasus dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tiga kriteria. Pertama, polemik melibatkan pendakwah yang memiliki visibilitas dan jangkauan publik melalui media digital. Kedua, polemik memperoleh perhatian publik dan diikuti respons berupa permintaan maaf atau klarifikasi yang dapat ditelusuri. Ketiga, kasus memiliki karakter persoalan yang berbeda sehingga memungkinkan analisis komparatif. Kasus Gus Miftah dipilih karena berkaitan dengan interaksi verbal terhadap penjual es teh yang memicu kritik publik, sedangkan kasus Khalid Basalamah dipilih karena berkaitan dengan interpretasi pernyataan keagamaan mengenai wayang dan tradisi budaya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah video permintaan maaf atau klarifikasi pascapolemik. Unit pencatatan mencakup segmen pernyataan, kalimat, narasi, atau tindakan audiovisual yang relevan dengan strategi komunikasi dan konstruksi otoritas. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran video asli, pencatatan metadata video berupa judul, akun atau kanal, tanggal publikasi, durasi, dan tautan; pengamatan video; penyusunan transkrip; serta pencocokan transkrip dengan tayangan untuk menjaga ketepatan konteks. Data yang tidak dapat diverifikasi dari video primer dicatat sebagai keterbatasan dan tidak digunakan sebagai dasar klaim analitis.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten kualitatif dengan pengodean deduktif-induktif. Pengodean deduktif menggunakan tiga kategori utama otoritas Weber, yaitu karismatik, tradisional, dan rasional-legal. Otoritas karismatik ditelusuri melalui indikator representasi kualitas personal, narasi diri, pengakuan, ekspresi emosional, dan kedekatan dengan audiens. Otoritas tradisional ditelusuri melalui rujukan terhadap nilai, norma, kebiasaan, tradisi, komunitas, atau tatanan sosial yang diwariskan. Otoritas rasional-legal ditelusuri melalui penjelasan

sistematis, argumentasi, rujukan aturan atau prosedur, kedudukan formal, dan representasi tanggung jawab. Pengodean induktif digunakan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang muncul dari data, seperti pengakuan kesalahan, permintaan maaf, penjelasan konteks, reframing, penegasan identitas, komitmen perubahan, dan pemulihan hubungan.

Proses analisis meliputi pembacaan dan penayangan data berulang, penyusunan transkrip, penandaan segmen relevan, pemberian kode, pengelompokan kode ke dalam kategori, interpretasi berdasarkan teori Weber, dan perbandingan lintas kasus. Analisis komparatif dilakukan dengan memperhatikan konteks polemik, strategi respons, sumber legitimasi yang ditampilkan, dan bentuk komunikasi yang digunakan. Hasil interpretasi diarahkan untuk menjelaskan strategi pemulihan legitimasi yang direpresentasikan dalam video, bukan mengukur keberhasilan pemulihan legitimasi di masyarakat.

Untuk menjaga kredibilitas analisis, penelitian menerapkan pemeriksaan kesesuaian antara transkrip dan video, triangulasi konteks melalui pemberitaan yang kredibel, pencatatan proses pengodean, serta peninjauan kembali interpretasi terhadap segmen data. Peneliti juga membedakan deskripsi data dari interpretasi teoretis agar kategori Weber tidak dipaksakan pada setiap bentuk komunikasi. Aspek etika diperhatikan dengan menggunakan konten publik secara proporsional, menjaga konteks pernyataan, menghindari penilaian psikologis terhadap tokoh, dan tidak menyimpulkan penerimaan audiens tanpa data resepsi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Konteks Polemik dan Karakteristik Respons Pendakwah di Media Digital

Polemik yang melibatkan pendakwah populer di media digital menunjukkan bahwa komunikasi keagamaan tidak hanya berlangsung dalam ruang penyampaian pesan, tetapi juga berada dalam ruang evaluasi publik yang memungkinkan audiens memberikan penilaian secara cepat terhadap perilaku, pernyataan, dan sikap tokoh agama. Dalam konteks ini, potongan ceramah yang beredar melalui media sosial dapat membentuk persepsi publik yang berbeda dari konteks awal penyampaian pesan. Ketika suatu pernyataan menjadi kontroversial, pendakwah tidak hanya menghadapi persoalan interpretasi terhadap materi ceramah, tetapi juga tuntutan untuk memberikan respons terhadap penilaian sosial yang berkembang. Situasi tersebut menjadi penting karena popularitas pendakwah digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga oleh bagaimana mereka mempertahankan kepercayaan publik ketika menghadapi kritik.

Kasus Gus Miftah pada Desember 2024 merupakan salah satu contoh polemik komunikasi keagamaan yang berkembang melalui media digital. Peristiwa tersebut bermula dari video interaksi dengan seorang penjual es teh dalam kegiatan Magelang Bersholawat yang kemudian menyebar dan mendapatkan perhatian luas setelah pernyataannya dinilai sebagian masyarakat sebagai bentuk penghinaan terhadap pedagang kecil. Peristiwa ini memunculkan kritik yang tidak hanya berkaitan dengan pilihan bahasa, tetapi juga dengan etika komunikasi seorang tokoh publik yang memiliki posisi sosial dan pengaruh terhadap masyarakat. Penyebaran video tersebut memperlihatkan bagaimana interaksi yang berlangsung dalam suatu acara dapat berubah menjadi persoalan reputasi ketika dikonsumsi dalam ruang publik digital.

Respons Gus Miftah terhadap polemik tersebut dilakukan melalui penyampaian permintaan maaf dan tindakan mendatangi langsung penjual es teh yang menjadi pihak dalam peristiwa tersebut. Dalam pernyataan permintaan maafnya, ia mengakui adanya kekhilafan,

menjelaskan bahwa dirinya memiliki kebiasaan bercanda, serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang merasa terganggu oleh perkataannya. Ia juga menyatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi introspeksi untuk lebih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat di hadapan masyarakat. Selain respons verbal melalui video, tindakan mendatangi pihak terkait menjadi bagian dari respons yang diwujudkan melalui interaksi langsung. Respons tersebut dengan demikian melibatkan pernyataan verbal dan tindakan interpersonal.

Polemik yang melibatkan Khalid Basalamah pada Februari 2022 berangkat dari potongan ceramah yang membahas wayang dan pertanyaan mengenai profesi dalang serta persoalan taubat. Video tersebut memunculkan interpretasi publik bahwa Khalid Basalamah menyampaikan pandangan yang menolak atau mengharamkan wayang. Kontroversi berkembang karena wayang tidak hanya dipahami sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi, identitas budaya, dan warisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, respons terhadap ceramah tersebut melibatkan perbedaan pemahaman antara penafsiran keagamaan dan penghargaan terhadap tradisi kebudayaan.

Khalid Basalamah kemudian menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf melalui video yang dipublikasikan pada Februari 2022. Dalam respons tersebut, ia menjelaskan konteks ceramah, membatasi ruang lingkup pernyataan pada jawaban terhadap pertanyaan jamaah, serta menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menghapus wayang dari sejarah dan kebudayaan Indonesia. Ia juga menjelaskan kembali maksud pernyataannya mengenai menjadikan Islam sebagai tradisi dan tidak menjadikan tradisi sebagai Islam. Respons ini menunjukkan bahwa klarifikasi tidak hanya dilakukan dengan menyatakan penyesalan, tetapi juga melalui penjelasan ulang terhadap konteks, maksud, dan batas interpretasi pesan sebelumnya.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, terdapat perbedaan konteks polemik yang menjadi latar belakang respons pendakwah. Polemik Gus Miftah berkaitan dengan interaksi interpersonal dan etika komunikasi yang dipersepsikan publik sebagai tindakan merendahkan pihak lain, sedangkan polemik Khalid Basalamah berkaitan dengan interpretasi terhadap pernyataan keagamaan yang berhubungan dengan tradisi budaya. Perbedaan konteks ini memungkinkan penelitian membandingkan bagaimana pendakwah membangun respons ketika menghadapi kritik dengan karakter persoalan yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi, bentuk respons yang digunakan tidak dapat diasumsikan identik karena masing-masing berkaitan dengan karakter polemik, substansi kritik, dan kebutuhan penjelasan yang berbeda.

**Konstruksi Otoritas Pendakwah dalam Konten Permintaan Maaf**

Dalam perspektif Max Weber, otoritas merupakan bentuk kekuasaan yang memperoleh legitimasi ketika individu atau kelompok dipandang memiliki dasar yang dapat diterima untuk memengaruhi tindakan orang lain. Weber membedakan otoritas karismatik, tradisional, dan rasional-legal. Ketiga bentuk otoritas tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana pendakwah membangun posisi sosialnya, termasuk ketika menghadapi kritik yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik. Dalam konteks komunikasi digital, otoritas pendakwah tidak hanya hadir melalui penguasaan pengetahuan agama, tetapi juga melalui kemampuan menampilkan identitas, menjelaskan tindakan, merespons kritik, serta mempertahankan hubungan dengan audiens. Konten permintaan maaf dapat dipahami sebagai ruang komunikasi yang memungkinkan pendakwah menampilkan kembali dasar legitimasi yang melekat pada dirinya.

Pada kasus Gus Miftah, respons terhadap polemik memperlihatkan adanya upaya menampilkan dimensi personal melalui pengakuan atas kekhilafan, permohonan maaf, dan

tindakan mendatangi pihak yang terdampak. Pernyataan mengenai kebiasaan bercanda dan introspeksi merupakan bentuk komunikasi yang mengarahkan perhatian kepada identitas personal dan kesediaan mengakui kesalahan. Dalam kerangka otoritas karismatik Weber, dimensi personal relevan karena legitimasi karismatik berkaitan dengan kepercayaan terhadap kualitas, karakter, dan daya tarik individu yang dianggap memiliki keistimewaan oleh pengikutnya. Pengakuan atas kekhilafan juga dapat dibaca sebagai upaya menyesuaikan citra personal dengan tuntutan etika publik. Permintaan maaf berpotensi menjadi sarana mempertahankan hubungan sosial dengan audiens melalui penampilan sikap rendah hati, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan memperbaiki perilaku.

Selain dimensi personal, respons Gus Miftah juga memperlihatkan keterkaitan antara reputasi individu dan posisi sosial yang dimilikinya. Pemberitaan mengenai polemik turut menyoroti kedudukannya sebagai tokoh publik dan pejabat pada saat peristiwa berlangsung. Keberadaan posisi formal memperluas ruang penilaian publik karena respons terhadap polemik tidak hanya berhubungan dengan citra sebagai pendakwah, tetapi juga dengan tanggung jawab yang melekat pada jabatan publik. Dalam perspektif Weber, aspek tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membaca dimensi otoritas rasional-legal, yakni legitimasi yang berhubungan dengan kedudukan, aturan, dan tanggung jawab formal. Meski demikian, posisi jabatan tidak otomatis membuktikan bahwa otoritas rasional-legal menjadi sumber legitimasi dominan dalam video permintaan maaf; hal tersebut tetap harus ditentukan melalui analisis isi komunikasi.

Pada kasus Khalid Basalamah, konstruksi otoritas lebih terlihat melalui penjelasan terhadap konteks keagamaan dan batas interpretasi atas pernyataan sebelumnya. Klarifikasi yang disampaikan dengan penataan penjelasan memperlihatkan upaya membangun argumentasi yang terstruktur. Ia menjelaskan konteks pertanyaan jamaah, maksud pernyataan mengenai tradisi, serta alasan mengapa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai pengharaman wayang secara menyeluruh. Pola komunikasi semacam ini relevan untuk dianalisis melalui aspek argumentasi dan sistematisasi penjelasan. Namun, dalam konteks pendakwah, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya terpisah dari otoritas keagamaan yang dibangun melalui pengetahuan dan kapasitas interpretasi. Konstruksi otoritas dalam video klarifikasi dengan demikian berpotensi memperlihatkan hubungan antara legitimasi berbasis kompetensi keagamaan dan legitimasi berbasis argumentasi.

Dimensi otoritas tradisional juga relevan dalam menganalisis kedua kasus, meskipun keberadaannya tidak dapat ditentukan hanya dari status seseorang sebagai pendakwah. Otoritas tradisional dalam pemikiran Weber berkaitan dengan legitimasi yang bersumber dari kebiasaan, tradisi, dan tatanan yang telah berlangsung secara historis. Dalam kasus Khalid Basalamah, polemik wayang memiliki hubungan langsung dengan persoalan tradisi budaya sehingga klarifikasi yang membahas relasi Islam dan tradisi menjadi ruang pertemuan antara otoritas keagamaan dan nilai sosial yang diwariskan. Sementara itu, pada kasus Gus Miftah, hubungan dengan masyarakat, interaksi langsung, dan praktik silaturahmi dapat dianalisis sebagai tindakan sosial yang memiliki makna dalam budaya masyarakat Indonesia. Namun, tindakan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai indikator otoritas tradisional apabila data video menunjukkan penggunaan nilai, norma, atau legitimasi yang bersumber dari tradisi secara jelas.

Konstruksi otoritas dalam konten permintaan maaf tidak harus hadir secara tunggal dalam satu bentuk. Pendakwah dapat menampilkan unsur personal, argumentatif, sosial, dan institusional secara bersamaan. Pendekatan Weber memungkinkan penelitian mengidentifikasi bagaimana berbagai sumber legitimasi tersebut ditampilkan dalam komunikasi pascapolemik. Analisis tidak

diarahkan untuk menentukan siapa yang memiliki otoritas paling kuat secara objektif, melainkan untuk memahami bentuk otoritas yang digunakan sebagai dasar membangun kembali kepercayaan dalam konten respons. Hal ini penting karena legitimasi dalam ruang digital tidak hanya berhubungan dengan status pendakwah sebelum polemik terjadi, tetapi juga dengan bagaimana status tersebut dikomunikasikan, dipertahankan, dan dinegosiasikan setelah memperoleh kritik publik.

**Strategi Komunikasi Pemulihan Legitimasi Pascapolemik**

Permintaan maaf dalam komunikasi publik tidak selalu terbatas pada pengakuan kesalahan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengelola konsekuensi sosial yang muncul akibat suatu polemik. Ketika pernyataan seorang tokoh menjadi kontroversial, respons yang disampaikan dapat memuat beberapa fungsi sekaligus, seperti mengakui persoalan, menjelaskan maksud komunikasi, mengurangi kesalahpahaman, memperlihatkan sikap tanggung jawab, serta membangun kembali hubungan dengan pihak yang terdampak. Dalam konteks pendakwah populer, strategi tersebut memiliki dimensi yang lebih kompleks karena reputasi yang dipertaruhkan tidak hanya berkaitan dengan popularitas, tetapi juga kepercayaan terhadap kapasitas moral dan keagamaan. Oleh karena itu, konten permintaan maaf dapat dianalisis sebagai bentuk komunikasi yang menghubungkan pengakuan terhadap polemik dengan upaya mempertahankan legitimasi sosial.

Strategi pertama yang terlihat dalam kasus Gus Miftah adalah pengakuan terhadap kekhilafan dan penyampaian permintaan maaf secara langsung. Pernyataan yang mengawali respons dengan pengakuan bahwa dirinya melakukan kekhilafan serta permohonan maaf kepada masyarakat memperlihatkan penerimaan terhadap konsekuensi komunikasi yang telah menimbulkan polemik. Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena respons terhadap kritik tidak sepenuhnya diarahkan untuk menyangkal peristiwa, tetapi juga mencakup kesediaan mengakui bahwa perkataan yang disampaikan menimbulkan persoalan. Dalam komunikasi pemulihan legitimasi, pengakuan terhadap kesalahan dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi jarak antara tokoh yang dikritik dan masyarakat yang memberikan penilaian. Namun, keberhasilan pemulihan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan pernyataan maaf.

Strategi berikutnya dalam kasus Gus Miftah adalah penjelasan mengenai konteks tindakan yang dipersoalkan. Ia menyampaikan bahwa dirinya memiliki kebiasaan bercanda, sehingga pernyataan yang menjadi polemik pada awalnya dimaksudkan sebagai candaan. Penjelasan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkenalkan kembali maksud komunikatif yang mendasari peristiwa tersebut. Dalam analisis komunikasi, tindakan ini dapat dipahami sebagai strategi penjelasan konteks, yaitu memberikan informasi tambahan agar audiens dapat memahami suatu pernyataan melalui latar belakang yang disampaikan komunikator. Namun, maksud pribadi komunikator tidak selalu sama dengan interpretasi audiens. Ketika sebuah pernyataan telah dinilai melampaui batas kepantasan oleh masyarakat, penjelasan mengenai niat awal tidak serta-merta menghapus dampak yang muncul. Penjelasan konteks pada kasus ini berjalan bersamaan dengan pengakuan kekhilafan dan permohonan maaf, bukan semata-mata sebagai upaya membenarkan tindakan sebelumnya.

Strategi pemulihan pada kasus Gus Miftah juga melibatkan tindakan langsung dengan mendatangi penjual es teh yang menjadi pihak dalam polemik. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa respons tidak hanya berorientasi pada komunikasi melalui media, tetapi juga pada hubungan interpersonal dengan individu yang terdampak. Dalam perspektif komunikasi simbolik, tindakan mendatangi pihak yang bersangkutan, berinteraksi, dan menyampaikan permohonan

maaf secara langsung dapat memiliki makna konkret dibandingkan pernyataan verbal tanpa kontak langsung. Tindakan tersebut berpotensi memperlihatkan kesediaan menghadapi persoalan dan memulihkan hubungan yang terganggu. Akan tetapi, tindakan tersebut tidak secara otomatis diartikan sebagai bukti bahwa legitimasi publik telah pulih, melainkan sebagai strategi komunikatif yang ditampilkan dalam proses pemulihan hubungan.

Berbeda dengan kasus Gus Miftah, strategi komunikasi Khalid Basalamah lebih menonjol pada klarifikasi, pembatasan konteks, dan penjelasan argumentatif terhadap pernyataan yang menjadi polemik. Ia menjelaskan bahwa pernyataan mengenai wayang disampaikan dalam konteks pengajian dan sebagai jawaban terhadap pertanyaan jamaah. Ia kemudian menjelaskan kembali maksud pernyataan mengenai menjadikan Islam sebagai tradisi serta menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengharamkan wayang secara menyeluruh. Strategi tersebut menunjukkan adanya usaha untuk mengendalikan interpretasi terhadap pesan yang sebelumnya beredar melalui potongan video. Dalam konteks komunikasi digital, penjelasan konteks awal menjadi penting karena pesan yang tersebar melalui berbagai akun dapat mengalami pemisahan dari situasi komunikasi yang melatarbelakanginya. Dengan memberikan penjelasan ulang, komunikator berusaha mengarahkan audiens kepada interpretasi yang menurutnya sesuai dengan maksud pernyataan awal.

Strategi pembatasan konteks pada kasus Khalid Basalamah dapat dipahami sebagai reframing, yaitu penyusunan kembali kerangka interpretasi terhadap suatu peristiwa melalui penjelasan aspek yang dianggap penting oleh komunikator. Dalam klarifikasinya, ia menempatkan pernyataan yang dipersoalkan sebagai bagian dari tanya jawab dalam pengajian, bukan sebagai pernyataan umum yang ditujukan untuk menghapus seluruh tradisi wayang dalam masyarakat Indonesia. Melalui pembatasan tersebut, ruang interpretasi terhadap pesan diarahkan dari pemahaman yang bersifat generalisasi menuju pemahaman yang lebih kontekstual. Strategi ini dapat membantu menjelaskan maksud komunikator, tetapi sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan antara konteks penyampaian pesan dan konteks penerimaan pesan oleh masyarakat. Perbedaan konteks tersebut menjadi salah satu karakter komunikasi digital yang membuat klarifikasi dan penjelasan ulang memiliki peran penting dalam menghadapi polemik.

Selain klarifikasi substantif, permohonan maaf Khalid Basalamah memperlihatkan adanya strategi pengakuan terhadap dampak sosial dari pernyataan yang disampaikan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa terganggu atau tersinggung. Pernyataan tersebut menarik karena memisahkan dua tindakan komunikatif, yaitu menjelaskan maksud pernyataan dan mengakui adanya kemungkinan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa klarifikasi tidak selalu berfungsi sebagai penyangkalan terhadap kritik, tetapi dapat berjalan bersamaan dengan pengakuan bahwa komunikasi yang dilakukan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain. Dalam kerangka pemulihan legitimasi, kombinasi penjelasan dan permohonan maaf menjadi penting karena memungkinkan komunikator mempertahankan argumentasi mengenai maksudnya sekaligus menunjukkan respons terhadap penilaian publik.

Jika dibandingkan, kedua pendakwah memperlihatkan kesamaan dalam penggunaan permohonan maaf sebagai bagian dari respons pascapolemik, tetapi memiliki perbedaan dalam penekanan strategi komunikasinya. Pada kasus Gus Miftah, respons lebih banyak menampilkan pengakuan kekhilafan, penjelasan mengenai maksud bercanda, introspeksi, dan tindakan mendatangi pihak yang terdampak. Sementara itu, pada kasus Khalid Basalamah, respons lebih menonjolkan penjelasan konteks ceramah, pembatasan makna pernyataan, klarifikasi argumentatif, dan permohonan maaf. Perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai penyesuaian

strategi komunikasi terhadap karakter polemik. Polemik yang berhubungan dengan interaksi interpersonal menuntut perhatian terhadap hubungan dengan pihak yang terdampak, sedangkan polemik yang berkaitan dengan interpretasi keagamaan dan budaya memerlukan penjelasan terhadap substansi dan konteks pernyataan. Pemulihan legitimasi dalam komunikasi pendakwah populer dengan demikian tidak dapat dipahami sebagai proses yang menggunakan satu pola permintaan maaf yang seragam.

**Perbandingan Pemulihan Legitimasi Gus Miftah dan Khalid Basalamah dalam Perspektif Max Weber**

Perbandingan kedua kasus menunjukkan bahwa pemulihan legitimasi pendakwah populer berlangsung melalui interaksi antara identitas personal, penjelasan terhadap substansi polemik, dan respons terhadap tuntutan sosial. Meskipun Gus Miftah dan Khalid Basalamah sama-sama memiliki posisi sebagai pendakwah populer serta menghadapi kontroversi yang berkembang melalui media digital, karakter polemik yang mereka hadapi berbeda. Gus Miftah menghadapi kritik terhadap tindakan verbal dalam interaksi dengan penjual es teh, sedangkan Khalid Basalamah menghadapi kritik terhadap interpretasi pernyataan keagamaan yang berkaitan dengan wayang. Perbedaan tersebut memengaruhi bentuk komunikasi yang digunakan dalam merespons polemik. Oleh sebab itu, pemulihan legitimasi dalam kedua kasus lebih tepat dipahami sebagai proses yang melibatkan penyesuaian strategi terhadap jenis kritik yang muncul, bukan sekadar pengulangan tindakan meminta maaf.

Dari perspektif otoritas karismatik Weber, kedua kasus memperlihatkan relevansi identitas personal pendakwah dalam proses komunikasi pascapolemik. Otoritas karismatik tidak hanya berkaitan dengan popularitas, tetapi juga dengan kepercayaan yang dilekatkan masyarakat pada kualitas personal seorang tokoh. Ketika polemik muncul, kualitas personal tersebut menjadi bagian dari penilaian publik dan dapat mengalami penguatan maupun tantangan. Pada kasus Gus Miftah, pengakuan kekhilafan, pernyataan introspeksi, dan tindakan mendatangi pihak yang terdampak dapat dianalisis sebagai upaya menampilkan kembali karakter personal yang terbuka terhadap kritik. Pada kasus Khalid Basalamah, klarifikasi dan penegasan mengenai maksud pernyataannya menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas sebagai pendakwah yang memiliki dasar argumentasi dalam menyampaikan pandangan keagamaan. Kedua bentuk respons tersebut memperlihatkan bahwa pemeliharaan otoritas personal tidak hanya dilakukan melalui penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga melalui komunikasi ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik.

Perbedaan strategi kedua tokoh juga dapat dijelaskan melalui hubungan antara otoritas karismatik dan kebutuhan mempertahankan konsistensi identitas. Pada kasus Gus Miftah, strategi pemulihan lebih berorientasi pada pengakuan terhadap kesalahan interpersonal dan upaya membangun kembali hubungan dengan pihak yang terdampak. Hal ini memperlihatkan bahwa reputasi personal sebagai pendakwah dapat dipertahankan melalui penampilan sikap yang mengakui kritik dan memperlihatkan kesediaan memperbaiki hubungan sosial. Sementara itu, pada kasus Khalid Basalamah, strategi pemulihan lebih berorientasi pada penjelasan mengenai makna dan ruang lingkup pernyataan yang dipersoalkan. Respons tersebut memperlihatkan bahwa mempertahankan legitimasi personal dapat dilakukan melalui argumentasi dan klarifikasi terhadap interpretasi yang berkembang di masyarakat. Dalam kedua kasus, otoritas karismatik tidak semata-mata dipertahankan melalui daya tarik personal, tetapi juga melalui kemampuan merespons polemik dengan bentuk komunikasi yang dinilai relevan terhadap persoalan yang dihadapi.

Perspektif otoritas rasional-legal Weber memberikan ruang analisis terhadap aspek tanggung jawab, penjelasan, dan posisi formal dalam respons pascapolemik. Pada kasus Gus Miftah, keberadaan jabatan publik yang melekat pada dirinya ketika polemik terjadi memperlihatkan bahwa kontroversi tidak hanya berhubungan dengan reputasi sebagai pendakwah, tetapi juga dengan ekspektasi terhadap tanggung jawab komunikasi seorang pejabat. Dalam konteks ini, respons terhadap kritik dapat dibaca sebagai bagian dari pengelolaan tanggung jawab sosial dan institusional. Pada kasus Khalid Basalamah, aspek argumentatif dalam klarifikasi lebih tampak melalui penataan penjelasan dan pembatasan konteks pernyataan. Kedua bentuk tersebut memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan bahwa komunikasi pascapolemik dapat memuat unsur penjelasan, rasionalisasi, dan penataan kembali makna. Analisis Weber tidak menempatkan unsur tersebut secara otomatis sebagai otoritas rasional-legal yang dominan, melainkan menggunakannya untuk mengidentifikasi bagaimana legitimasi melalui argumentasi dan tanggung jawab direpresentasikan dalam konten.

Otoritas tradisional juga menjadi perspektif yang relevan dalam memahami kedua kasus, terutama karena komunikasi pendakwah populer berada dalam hubungan dengan nilai sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Pada kasus Gus Miftah, tindakan mendatangi penjual es teh dan membangun komunikasi langsung dapat dikaji dalam konteks nilai silaturahmi, penghormatan terhadap sesama, dan penyelesaian hubungan sosial. Pada kasus Khalid Basalamah, persoalan wayang menghadirkan hubungan yang lebih eksplisit antara interpretasi agama dan tradisi budaya. Klarifikasi yang disampaikan berusaha menjelaskan bagaimana tradisi dipahami dalam hubungannya dengan nilai Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dimensi tradisional dalam komunikasi pascapolemik dapat hadir melalui praktik hubungan sosial maupun melalui pembahasan langsung mengenai tradisi. Namun, penelitian perlu membedakan antara penggunaan nilai budaya sebagai strategi komunikasi dan otoritas tradisional dalam pengertian Weber, sebab keduanya tidak sepenuhnya identik.

Secara komparatif, kedua kasus memperlihatkan bahwa permintaan maaf dan klarifikasi memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar merespons kritik. Respons tersebut menjadi ruang bagi pendakwah untuk menjelaskan kembali identitas, menegaskan maksud komunikasi, dan mengelola hubungan dengan masyarakat yang memberikan penilaian terhadap tindakan mereka. Gus Miftah lebih menonjolkan respons yang melibatkan pengakuan kekhilafan, penjelasan niat, introspeksi, dan pendekatan interpersonal terhadap pihak yang terdampak. Khalid Basalamah lebih menonjolkan penjelasan kontekstual, pembatasan interpretasi, argumentasi, dan permohonan maaf. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa strategi pemulihan legitimasi dapat dipengaruhi oleh karakter polemik serta bentuk tuntutan yang muncul dalam ruang publik digital. Dalam kerangka Weber, strategi tersebut dapat dianalisis sebagai kombinasi berbagai sumber legitimasi yang tidak selalu hadir secara terpisah, melainkan dapat saling melengkapi dalam komunikasi seorang pendakwah.

Hasil perbandingan ini memberikan kontribusi terhadap kajian otoritas keagamaan digital dengan menempatkan permintaan maaf sebagai bagian dari proses komunikasi pascapolemik. Kajian mengenai pendakwah di media digital dapat diarahkan untuk memahami bagaimana otoritas dibangun melalui popularitas, penyebaran pesan, interaksi dengan audiens, dan kontestasi wacana. Penelitian ini memusatkan perhatian pada fase ketika otoritas menghadapi kritik dan memerlukan respons untuk mempertahankan atau menegosiasikan kembali legitimasi. Pergeseran fokus tersebut memungkinkan pemahaman bahwa otoritas pendakwah tidak hanya dibentuk melalui ceramah dan aktivitas dakwah, tetapi juga melalui cara mereka merespons kritik,

menjelaskan tindakan, dan menampilkan tanggung jawab setelah polemik terjadi. Dengan demikian, pemulihan legitimasi dapat menjadi perspektif analitis untuk memahami dinamika otoritas keagamaan dalam ekosistem komunikasi digital yang ditandai oleh keterbukaan, kecepatan distribusi informasi, dan intensitas penilaian publik.

Pada akhirnya, pemulihan legitimasi dalam kedua kasus tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaan video permintaan maaf, klarifikasi, atau tindakan langsung terhadap pihak yang terdampak. Legitimasi merupakan proses sosial yang berkaitan dengan penerimaan dan kepercayaan masyarakat, sehingga penilaian mengenai keberhasilan pemulihan memerlukan data tambahan berupa respons audiens, komentar publik, perkembangan reputasi, atau bentuk penerimaan sosial setelah konten permintaan maaf disampaikan. Berdasarkan data konten yang menjadi fokus penelitian, kesimpulan yang dapat diarahkan adalah bahwa Gus Miftah dan Khalid Basalamah menampilkan strategi komunikasi yang berbeda dalam merespons polemik, dan perbedaan tersebut dapat dibaca melalui kombinasi dimensi otoritas karismatik, tradisional, serta rasional-legal Weber. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan praktik komunikasi pemulihan legitimasi yang direpresentasikan dalam konten permintaan maaf dan klarifikasi, bukan mengklaim bahwa legitimasi kedua pendakwah telah sepenuhnya pulih di mata masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pemulihan legitimasi pendakwah populer pascapolemik digital melalui perbandingan kasus Gus Miftah dan Khalid Basalamah dengan menggunakan perspektif otoritas Max Weber. Berdasarkan analisis terhadap konteks polemik dan respons yang disampaikan kedua pendakwah, dapat dipahami bahwa permintaan maaf dan klarifikasi merupakan bagian dari praktik komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kontroversi, tetapi juga berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas, kredibilitas, dan hubungan sosial dengan masyarakat. Dalam ruang digital, polemik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pendakwah karena pernyataan yang disampaikan tidak hanya dinilai berdasarkan maksud komunikator, tetapi juga berdasarkan interpretasi, nilai, dan ekspektasi audiens. Oleh karena itu, respons pascapolemik menjadi bagian penting dalam dinamika pembentukan dan negosiasi kembali otoritas keagamaan.

Hasil perbandingan menunjukkan adanya perbedaan penekanan strategi komunikasi antara Gus Miftah dan Khalid Basalamah. Respons Gus Miftah cenderung menampilkan pengakuan atas kekhilafan, permohonan maaf, introspeksi, penjelasan mengenai maksud pernyataan, serta tindakan langsung mendatangi pihak yang terdampak. Strategi tersebut memperlihatkan penekanan pada pendekatan personal dan pemulihan hubungan interpersonal. Sementara itu, respons Khalid Basalamah lebih menonjolkan klarifikasi konteks, penjelasan argumentatif, pembatasan interpretasi terhadap pesan yang menjadi polemik, dan penyampaian permohonan maaf. Perbedaan ini menunjukkan bahwa respons pascapolemik dipengaruhi oleh karakter persoalan yang dihadapi, sehingga pemulihan legitimasi tidak selalu berlangsung melalui pola komunikasi yang sama.

Dalam perspektif Max Weber, kedua kasus memperlihatkan bahwa konstruksi otoritas pendakwah dapat melibatkan dimensi karismatik, tradisional, dan rasional-legal secara bersamaan. Dimensi karismatik berkaitan dengan identitas personal, reputasi, dan kepercayaan yang dilekatkan kepada pendakwah, sedangkan dimensi tradisional berhubungan dengan nilai sosial, kebiasaan, dan hubungan budaya yang menjadi bagian dari penerimaan masyarakat. Adapun

dimensi rasional-legal dapat digunakan untuk memahami aspek penjelasan, argumentasi, tanggung jawab, serta kedudukan formal yang ditampilkan dalam respons pascapolemik. Ketiga dimensi tersebut memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pendakwah berusaha menjelaskan tindakan, mempertahankan identitas, dan menegosiasikan legitimasi ketika menghadapi kritik publik. Namun, keberadaan unsur-unsur tersebut dalam komunikasi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa legitimasi sosial telah sepenuhnya pulih.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian otoritas keagamaan digital dengan menggeser perhatian dari proses pembentukan otoritas sebelum polemik menuju praktik komunikasi setelah otoritas menghadapi kritik. Permintaan maaf dan klarifikasi diposisikan sebagai ruang komunikasi yang memungkinkan pendakwah melakukan negosiasi legitimasi melalui pengakuan, penjelasan, argumentasi, dan tindakan sosial. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai otoritas keagamaan digital sebagai fenomena yang tidak hanya dibangun melalui popularitas, aktivitas dakwah, dan interaksi dengan audiens, tetapi juga melalui cara tokoh merespons kontroversi yang berkembang di ruang publik digital.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada konten permintaan maaf dan klarifikasi yang dipublikasikan oleh pendakwah, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana audiens menerima, menafsirkan, atau merespons upaya pemulihan tersebut. Analisis terhadap video memungkinkan penelitian mengidentifikasi strategi komunikasi dan representasi otoritas yang ditampilkan, tetapi tidak dapat secara langsung membuktikan keberhasilan pemulihan legitimasi di tingkat masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui analisis komentar audiens, wawancara dengan penerima pesan, analisis sentimen publik, atau studi longitudinal terhadap perubahan persepsi masyarakat setelah polemik. Pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai hubungan antara strategi permintaan maaf, konstruksi otoritas, dan penerimaan legitimasi pendakwah dalam ekosistem media digital.

## DAFTAR PUSTAKA

Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review, 23(2), 177–186. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(97)90023-0

Choi, G. Y., & Mitchell, A. M. (2022). So sorry, now please watch: Identifying image repair strategies, sincerity and forgiveness in YouTubers' apology videos. Public Relations Review, 48(4), Article 102226. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102226

Detik.com. (2022). Duduk perkara video wayang haram Khalid Basalamah dan kontroversinya. https://www.detik.com/jateng/berita/d-5943054/duduk-perkara-video-wayang-haram-khalid-basalamah-dan-kontroversinya

Detik.com. (2022). Soal wayang, ini klarifikasi dan permohonan maaf Khalid Basalamah. https://www.detik.com/jateng/berita/d-5945113/soal-wayang-ini-klarifikasi-dan-permohonan-maaf-khalid-basalamah

Detik.com. (2024). Permintaan maaf lengkap Gus Miftah soal ucapan ke penjual es teh bakul. https://www.detik.com/pop/trending/d-7669799/permintaan-maaf-lengkap-gus-miftah-soal-ucapan-ke-penjual-es-teh-bakul

Ni'am, M. F. (2023). Menakar kembali otoritas ulama: Antara kesalehan dan komodifikasi agama. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 8(2), 135–160. https://doi.org/10.14421/jkii.v8i2.1349

Sandlin, J. K., & Gracyalny, M. L. (2018). Seeking sincerity, finding forgiveness: YouTube apologies as image repair. Public Relations Review, 44(3), 393–406. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.04.007

Video permintaan maaf Gus Miftah. (2024). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DoKJF8Nuatw

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.